

**LAPORAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**USULAN PENGEMBANGAN KAMPUNG KREATIF WISATA
BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
DI KOTA TANGERANG SELATAN**

Ketua	: Kusmalinda Madjid, S.T., M.Si.	NIDN 0328016704
Anggota	: Forina Lestari, S.T., MSc., Ph.D	NIDN 0329058408
	Melza Dvina, S.PWK	Alumni
	Fakhri Rafi A	NIM: 1232800002
	Kamilah Djakaria	NIM: 1232800004
	Prastyaning Anjani	NIM: 1232800005
	Henny Febriyanti	NIM: 1232705001

Nomor Surat Tugas : 006/ST-PkM/PRPM-ITI/I/2026

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
Semester Ganjil 2024/2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertajuk **"Usulan Pengembangan Kampung Kreatif Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Tangerang Selatan"** dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan rumusan strategi penataan ruang di Kampung Bambu Kuning, khususnya pada wilayah RT 02 dan RT 04. Fokus utama kegiatan ini adalah mentransformasi tantangan fragmentasi ruang dan optimalisasi sarana ekonomi untuk penyerapan hasil panen lokal.

Keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, tim pelaksana menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pengurus RT 02 dan RT 04 Kampung Bambu Kuning, yang telah menerima tim dengan tangan terbuka dan memberikan data serta aspirasi yang jujur selama proses FGD.
2. Seluruh warga dan komunitas pesepeda, yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap rencana pengembangan kampung.

Tim penyusun menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Namun, besar harapan kami agar usulan ini dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan warga setempat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, mandiri, dan berdaya saing ekonomi. Semoga laporan ini memberikan manfaat nyata bagi pengembangan keilmuan perencanaan wilayah dan khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Kampung Bambu Kuning.

Tangerang Selatan, 26 Februari 2026



Tim Pengabdian kepada Masyarakat
(Ketua)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian : Usulan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis
Partisipasi Masyarakat di Kota Tangerang Selatan

Nama Mitra Kegiatan : Komunitas Kampung Bambu Kuning
Kecamatan Pondok Aren

Tim Pengabdian

a. Nama Lengkap : Kusmalinda Madjid, S.T., M.Si
NIDN : 0328016704
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Nomor HP : 08174895465

b. Anggota

Nama : Forina Lestari, S.T., M.Sc. Ph.D
NIDN : 0329058408

Nama : Melza Dvina, S.PWK
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Nama : Fakhri Rafi A
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Nama : Kamilah Djakaria
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Nama : Prastyaning Anjani
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Nama : Henny Febriyanti
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Tahun Pelaksanaan : I

Institusi Sumber Dana : Mandiri

Keterlibatan Insitusi Lain : -

Biaya Keseluruhan : Rp 5.000.000,-

Tangerang Selatan, 26 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

(H. Medtry, S.T., M.T)
NIDN: 03029067202

Ketua Tim



(Kusmalinda Madjid, S.T., M.Si)
NIDN: 0328016704

Menyetujui,
Kepala Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Institut Teknologi Indonesia



(Prof. Dr. Ir. Ratnawati, M.Eng.Sc., IPM)
NIDN : 0301036303

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Kegiatan : Usulan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Tangerang Selatan

2. Tim Pelaksana :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Kusmalinda Madjid, S.T., M.Si	Ketua	Perencanaan Partisipatif	PWK	6 jam/minggu
2	Forina Lestari, S.T., M.Sc. Ph.D	Anggota	Perencanaan Kota	PWK	4 jam/minggu
3	Melza Dvina, S.PWK	Anggota	Pemetaan	PWK	4 jam/minggu
4	Fakhri Rafi A	Anggota	Surveyor	PWK	4 jam/minggu
5	Kamilah Djakaria	Anggota	Surveyor	PWK	4 jam/minggu
6	Prastyaning Anjani	Anggota	Surveyor	PWK	4 jam/minggu
7	Henny Febriyanti	Anggota	Surveyor	PWK	4 jam/minggu

3. Sasaran Kegiatan : *Action Plan* (Rencana Aksi) pengembangan kawasan.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan September 2025

Berakhir : Bulan Januari 2026

5. Usulan Biaya : Rp. 5.000.000,-

6. Lokasi Kegiatan : Kota Tangerang Selatan

7. Mitra yang terlibat : Komunitas Kampung Bambu Kuning Kec. Pondok Aren

8. Permasalahan yang ditemukan di mitra:

Tantangan dalam menjaga konsistensi partisipasi warga dan pemeliharaan fasilitas publik yang telah dibangun agar identitas lokal Kampung Bambu Kuning tetap terjaga.

9. Solusi yang ditawarkan : Penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas untuk

mengelola potensi wisata secara mandiri.

10. Luaran : Buku Laporan PkM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	4
2.1 Target	4
2.2 Luaran.....	4
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	7
3.1 Tahapan Kegiatan	7
3.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	8
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	9
3.4 Monitoring dan Evaluasi	10
BAB IV HASIL DAN KELUARAN YANG DICAPAI	12
4.1 Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data	12
4.2 Hasil Survei Sosial dan Analisis	13
4.3 Rumusan Konsep	14
4.4 Indikator Capaian Penataan	24
4.5 Rencana Keberlanjutan Program Penataan	26
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBERLANJUTAN	28
5.1 Kesimpulan	28
5.2 Rekomendasi Keberlanjutan	28
DAFTAR PUSTAKA	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kampung Gowes Bambu Kuning yang terletak di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, telah tumbuh secara organik menjadi destinasi favorit komunitas pesepeda di Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2019. Dengan karakteristik vegetasi bambu kuning dan jalur sirkulasi yang teduh, kawasan ini memiliki modal sosial dan identitas lokal yang sangat kuat. Namun, di balik popularitasnya sebagai "Kampung Wisata", terdapat kesenjangan signifikan antara eksistensi aktivitas wisata dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Berdasarkan data Studio Integral Komunitas (SIK) 2025, keterlibatan ekonomi warga masih bersifat pasif. Meskipun terdapat aliran pengunjung yang tinggi pada akhir pekan, warga belum memiliki wadah terpadu untuk memasarkan potensi lokal seperti hasil kebun (kangkung dan bayam) atau produk kuliner rumahan. Jarak ke pasar terdekat yang mencapai 15 menit menggunakan kendaraan bermotor membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan harian sekaligus kehilangan peluang untuk menangkap potensi pasar dari para pesepeda.

Dari sisi spasial dan keamanan, terdapat area kritis yang dikenal sebagai jalur "Katro" (kolong tol). Jalur ini merupakan akses penghubung vital antar-RT, namun kondisinya saat ini sangat memprihatinkan: gelap, sempit (tidak dapat dilalui kendaraan roda empat), dan secara psikologis dianggap "seram" oleh warga. Keluhan warga mencatat bahwa setelah pukul 17.00 WIB, jalur ini menjadi area yang dihindari karena kerawanan kriminalitas (seperti riwayat pencurian motor dan begal), sehingga mobilitas warga terfragmentasi.

PkM ini hadir bukan sekadar untuk menganalisis masalah tersebut, melainkan untuk memberikan solusi penataan yang konkret. Fokus utama PkM adalah menjembatani aset modal sosial warga yang inklusif dengan kebutuhan infrastruktur yang aman dan produktif. Melalui usulan pengembangan kampung kreatif, kegiatan ini diarahkan untuk mengubah titik-titik rawan (seperti jalur Katro) menjadi koridor yang terang dan aman, serta menciptakan ruang ekonomi berbasis partisipasi masyarakat yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi warga setempat.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan identifikasi lapangan dan melalui diskusi dengan warga RT 02 dan 04, masalah utama yang menjadi fokus PkM ini adalah:

1. Optimalisasi sarana ekonomi untuk penyerapan hasil panen lokal.

Warga Kampung Bambu Kuning memiliki potensi pertanian perkotaan yang produktif, khususnya dalam budidaya sayuran seperti kangkung dan bayam, namun saat ini sistem penjualannya masih bersifat sangat terbatas dan belum terorganisir dengan baik. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya sarana ekonomi atau 'pasar lingkungan' yang representatif di wilayah tersebut. Akibatnya, warga kehilangan peluang emas untuk menjajakan hasil panen mereka secara langsung kepada para pesepeda yang ramai berkunjung setiap akhir pekan. Padahal, integrasi antara jalur wisata gowes dengan area perdagangan lokal sangat krusial; tanpa adanya wadah permanen tersebut, hasil bumi lokal tidak dapat terserap secara optimal oleh wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan sarana ekonomi yang terintegrasi agar produk pertanian warga dapat tersaji sebagai oleh-oleh maupun konsumsi bagi pengunjung, sehingga kehadiran aktivitas wisata di kampung ini dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata dan langsung bagi kesejahteraan dapur warga.

2. Kondisi jalur penghubung antar RT yang gelap dan rawan keamanan (jalur Katro):
 - Terdapat kendala aksesibilitas pada jalur "Katro" (kolong tol) yang secara fisik tidak standar dan minim penerangan.
 - Kondisi yang dianggap "seram" dan adanya riwayat kriminalitas (pencurian motor) menyebabkan fragmentasi sosial antar-RT, di mana warga enggan melewati jalur tersebut saat hari mulai gelap, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak ekonomi dan sosial warga sendiri.
3. Keberlanjutan pemeliharaan lingkungan untuk daya tarik wisata:
 - Untuk menjaga agar pengunjung pesepeda terus datang secara berkelanjutan, kualitas lingkungan (keasrian dan kebersihan) Kampung Bambu Kuning harus tetap terjaga.

- Namun, saat ini masih ditemukan kendala dalam manajemen sampah (warga masih membakar sampah di lahan kosong) dan pemeliharaan vegetasi bambu kuning yang menjadi ikon kampung.
- Diperlukan pendampingan dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi agar warga mampu menjaga daya tarik visual kampung, sehingga pengunjung merasa nyaman dan konsisten melakukan kunjungan ulang (*repeat visit*).

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

Target utama dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara spesifik untuk menjawab persoalan ekonomi dan keamanan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat produktif dan pelaku UMKM lokal

Kelompok ini merupakan target utama dalam upaya optimalisasi penyerapan hasil panen lokal. Fokus pendampingan diberikan kepada warga RT 02 dan RT 04 yang memiliki usaha pertanian perkotaan (budidaya kangkung, bayam, dll) serta pemilik warung makan/minum di sepanjang jalur gowes. Mereka diarahkan untuk menjadi penggerak ekonomi di "pasar lingkungan" yang diusulkan, sehingga mampu menangkap peluang ekonomi dari para pengunjung pesepeda secara terorganisir.

2. Pemuda penggerak lingkungan (karang taruna/komunitas lokal)

Mengingat adanya kebutuhan akan pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan agar pesepeda terus datang, kelompok pemuda menjadi target krusial. Mereka akan berperan sebagai agen perubahan dalam mengelola fasilitas kampung, menjaga keasrian vegetasi bambu kuning, serta menginisiasi pengawasan partisipatif di area-area rawan seperti jalur "Katro". Keterlibatan pemuda diharapkan dapat menjamin regenerasi pengelola kampung kreatif di masa depan.

3. Tokoh masyarakat dan pengurus RT/RW

Sebagai mitra strategis, tokoh masyarakat menjadi target dalam hal penguatan kelembagaan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa usulan penataan koridor dan pembangunan sarana ekonomi memiliki legitimasi kuat, didukung oleh semangat gotong royong, serta mampu memulihkan fungsi sosial jalur penghubung yang selama ini dianggap terisolasi.

2.2 Luaran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini ditargetkan menghasilkan luaran nyata yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh mitra, baik dari aspek kapasitas

sumber daya manusia maupun perbaikan kualitas lingkungan fisik. Adapun luaran tersebut adalah:

1. Peningkatan kesadaran melalui sosialisasi ‘Kampung Kreatif’

Terselenggaranya program edukasi dan sosialisasi mengenai konsep "Kampung Kreatif Wisata" kepada warga RT 02 dan RT 04. Luaran ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton atas keramaian pesepeda, tetapi mampu secara mandiri mengelola potensi lingkungan dan pertanian mereka. Melalui sosialisasi ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga keasrian kampung sebagai aset wisata, sehingga pengunjung pesepeda merasa nyaman dan tertarik untuk melakukan kunjungan berulang yang berdampak pada stabilitas ekonomi warga.

2. Konsep rancangan teknis revitalisasi Jalur Katro

Tersusunnya sebuah dokumen usulan desain teknis penataan jalur "Katro" (kolong tol) yang komprehensif. Dokumen ini mencakup rencana perbaikan pencahayaan (*street lighting*) untuk menghilangkan kesan seram di malam hari, serta penambahan elemen estetika seperti mural atau penataan vegetasi yang sesuai dengan identitas kampung. *Design proposal* ini berfungsi sebagai panduan teknis bagi pengurus RT/RW maupun dasar pengajuan pembangunan kepada pihak terkait (Pemerintah Kota atau pengelola jalan tol) guna memulihkan fungsi jalur Katro sebagai konektor antar-wilayah yang aman dan manusiawi.

3. Konsep rancangan pasar lingkungan berbasis komunitas

Sebagai tindak lanjut dari masalah penyerapan hasil panen, PkM ini menghasilkan draft rancangan pengelolaan lapak/pasar lingkungan. Luaran ini akan memuat pengaturan zona berdagang bagi warga yang memiliki hasil kebun (kangkung, bayam, dll) agar terintegrasi dengan jalur sirkulasi pesepeda, sehingga tercipta ketertiban ruang sekaligus penguatan ekonomi dapur warga yang terorganisir.

Desain luaran yang dihasilkan dari kegiatan PkM ini tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan di atas kertas, tetapi juga menyentuh aspek perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat. Dengan adanya sinergi antara peningkatan kapasitas warga dalam mengelola potensi wisata dan tersedianya rancangan teknis yang solutif bagi permasalahan fisik di lapangan, diharapkan Kampung Bambu Kuning dapat bertransformasi menjadi kawasan yang tidak hanya asri dan aman, tetapi juga tangguh

secara ekonomi. Luaran ini pada akhirnya menjadi langkah awal bagi warga untuk secara berkesinambungan menjaga daya tarik kampung mereka, sehingga manfaat ekonomi dari kunjungan pesepeda dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Tahapan Kegiatan

Kegiatan PkM ini dilaksanakan dengan pendekatan *Community Based Development* (Pembangunan Berbasis Komunitas), dimana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi aktor utama dalam perencanaan. Tahapan kegiatan dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Pendampingan (Focus Group Discussion)

Tahap awal dilakukan dengan menjaring aspirasi langsung dari warga RT 02 dan RT 04 untuk memvalidasi kebutuhan fasilitas yang paling mendesak. Mengacu pada data wawancara (SIK 2025), fokus diskusi diarahkan pada pemecahan masalah keamanan jalur "Katro" dan sulitnya akses belanja harian. Melalui FGD ini, tim PkM mendengarkan suara warga mengenai trauma masa lalu terkait kriminalitas dan kegagalan komunikasi pembangunan jalur kolong tol sebelumnya, sehingga solusi yang ditawarkan benar-benar berangkat dari keresahan masyarakat.

2. Perancangan Partisipatif

Setelah aspirasi terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengajak warga menentukan titik-titik lokasi strategis untuk "Pasar Lingkungan". Berdasarkan temuan bahwa warga memiliki hasil kebun yang melimpah namun tidak terorganisir, tim bersama warga memetakan koridor yang paling sering dilalui pesepeda namun tidak mengganggu sirkulasi warga. Dalam tahap ini, warga terlibat aktif menentukan letak lapak yang efisien agar hasil panen lokal (kangkung dan bayam) dapat terlihat jelas oleh pengunjung (pesepeda) tanpa mengabaikan aspek kebersihan lingkungan.

3. Eksekusi Solusi (Penyusunan usulan penataan ruang koridor sebagai panduan pembangunan fisik ke depan).

Tahap akhir adalah merumuskan hasil diskusi dan pemetaan ke dalam sebuah dokumen usulan penataan ruang koridor yang konkret. Dokumen ini mencakup panduan teknis revitalisasi jalur Katro agar memenuhi standar keamanan publik (penerangan dan estetika) serta skema spasial pasar lingkungan. Usulan ini

berfungsi sebagai *blueprint* atau panduan bagi pengurus RT/RW dalam merealisasikan pembangunan fisik ke depan, sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga agar karakter Kampung Bambu Kuning tetap asri dan menarik bagi wisatawan secara berkelanjutan.

Rangkaian tahapan ini disusun untuk memastikan bahwa usulan pengembangan kampung kreatif bukan merupakan intervensi sepihak, melainkan hasil kolaborasi yang berakar pada kebutuhan riil masyarakat. Dengan mengedepankan aspek komunikasi yang selama ini dianggap kurang (berdasarkan pengalaman pembangunan jalur Katro di masa lalu), setiap tahapan PkM ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan warga terhadap penataan lingkungan mereka sendiri. Pada akhirnya, melalui proses pendampingan dan perancangan yang sistematis ini, target untuk menciptakan ruang ekonomi yang inklusif serta jalur mobilitas yang aman bagi warga dan wisatawan pesepeda dapat tercapai secara berkelanjutan.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PkM ini menggunakan metode *live-in*, di mana tim pelaksana tinggal dan beraktivitas bersama warga selama beberapa waktu (3 hari 2 malam) untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial-spasial di Kampung Bambu Kuning. Melalui metode *live-in* ini, tim pelaksana berhasil membangun kedekatan emosional dan kepercayaan dengan mitra, sehingga usulan penataan yang dihasilkan tidak bersifat *top-down*. Pendekatan interaksi langsung ini memastikan bahwa setiap solusi yang dirancang, mulai dari revitalisasi penerangan jalur Katro hingga penempatan lapak hasil tani, telah sesuai dengan ritme kehidupan harian warga dan mampu menjawab kendala spasial yang selama ini menjadi penghalang kemajuan Kampung Bambu Kuning. Melalui interaksi langsung ini, tim pelaksana dapat mengobservasi secara *real-time* dua aspek utama:

1. Pemahaman dinamika ekonomi lokal

Berdasarkan observasi langsung, tim mendapati bahwa aktivitas ekonomi warga sangat bergantung pada siklus kunjungan pesepeda. Selain itu, kampung juga memiliki potensi ekonomi kebun dengan dan waktu panen tertentu. Tim berinteraksi dengan ibu-ibu di RT 02 dan RT 04 yang terbiasa mengolah hasil kebun seperti kangkung dan bayam. Melalui metode ini, terungkap fakta bahwa

keterbatasan ekonomi saat ini bukan disebabkan oleh kurangnya produktivitas, melainkan karena ketiadaan akses pasar yang dekat (mengingat jarak ke pasar Jelupang/Ceger mencapai 15 menit dengan motor). Dengan *live-in*, tim dapat merasakan urgensi kebutuhan warga akan titik niaga dan potensi kunjungan pesepeda. Oleh karena itu, tim PkM merancang model penyediaan titik niaga yang terintegrasi dengan jalur gowes sebagai solusi praktis bagi ekonomi rumah tangga mereka.

2. Identifikasi kendala spasial sehari-hari

Metode *live-in* memungkinkan tim untuk merasakan langsung hambatan mobilitas yang dialami warga, terutama terkait jalur "Katro". Tim melakukan penelusuran jalur kolong tol tersebut pada sore menjelang malam hari bersama warga. Ditemukan bahwa secara fisik, jalur tersebut memang sangat sempit (tidak muat kendaraan roda empat) dan minim penerangan, yang secara psikologis menciptakan rasa tidak aman. Pengalaman langsung ini memvalidasi kekhawatiran warga mengenai kerawanan kriminalitas yang selama ini menghambat hubungan sosial antar-RT, sehingga tim dapat merumuskan usulan penataan yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga fungsional dalam meningkatkan rasa aman.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi bersama warga guna memastikan bahwa seluruh data yang terekam selama masa *live-in*, baik mengenai keluhan sampah yang masih dibakar di lahan kosong maupun trauma kehilangan kendaraan bermotor di masa lalu, telah terakomodasi dalam rencana pengembangan kampung kreatif ini.

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Idealnya manfaat dari kegiatan PkM ini terus berkembang dan tidak berhenti pada tahap usulan desain saja. Oleh karena itu disusun rencana keberlanjutan program sebagaimana diuraikan berikut:

1. Pendampingan berkelanjutan melalui Program Desa Binaan

Kegiatan PkM ini direncanakan untuk menjadi program jangka panjang yang berkesinambungan. Tim pelaksana akan menjajaki kerja sama formal untuk menjadikan Kampung Bambu Kuning sebagai wilayah binaan akademis. Hal ini memungkinkan adanya monitoring secara berkala terhadap implementasi usulan

penataan ruang koridor dan memberikan asistensi teknis lanjutan jika masyarakat menghadapi kendala dalam realisasi fisik di lapangan.

2. Integrasi dengan Program Pemerintah Daerah

Laporan dan luaran berupa *Design Proposal* dari PkM ini akan didorong untuk menjadi bahan advokasi bagi pengurus lingkungan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Tim PkM akan membantu warga dalam menarasikan kebutuhan teknis tersebut agar dapat diserap dalam program pembangunan Kota Tangerang Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kampung tematik dan infrastruktur lingkungan.

3. Transfer pengetahuan dan kapasitas lokal

Keberlanjutan program juga dilakukan melalui penguatan kapasitas agen perubahan lokal (*local champion*). Tim PkM akan membekali kelompok penggerak di RT 02 dan RT 04 dengan kemampuan dasar dalam membaca peta rencana dan mengomunikasikan potensi wisata kampung kepada pihak luar. Dengan demikian, warga memiliki kemandirian untuk melanjutkan promosi hasil pertanian dan daya tarik wisata secara profesional tanpa ketergantungan penuh pada tim pendamping.

Fokus utama keberlanjutan PkM ini adalah memastikan adanya transisi yang lancar dari tahap perencanaan ke tahap aksi nyata. Dengan mengintegrasikan usulan warga ke dalam kerangka kebijakan daerah dan memperkuat kapasitas aktor lokal, diharapkan semangat pengembangan kampung kreatif ini terus terjaga. Keberhasilan PkM ini tidak hanya diukur dari dokumen yang dihasilkan, tetapi dari kemandirian warga dalam mengawal pembangunan wilayahnya sehingga identitas Kampung Gowes Bambu Kuning dapat terus lestari dan produktif.

3.4 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur sejauh mana intervensi penataan ruang dan pendampingan ekonomi memberikan dampak nyata bagi mitra. Fokus evaluasi diarahkan pada aspek psikologi spasial dan fungsional koridor, sebagai berikut:

1. Evaluasi perubahan persepsi dan perilaku spasial

Indikator utama keberhasilan PkM ini adalah hilangnya stigma "seram" pada jalur "Katro" (kolong tol). Berdasarkan data awal hasil penelitian Kajian Pemetaan Sosial untuk Pengembangan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Tangerang Selatan. Studi Kasus: Kampung Bambu Kuning, Kecamatan Pondok Aren, warga enggan melewati jalur tersebut di atas jam 5 sore. Evaluasi akan dilakukan dengan memantau frekuensi penggunaan jalur tersebut pada jam-jam kritis. Keberhasilan tercapai apabila warga, terutama ibu-ibu dan anak-anak, mulai memanfaatkan kembali jalur Katro sebagai jalur sirkulasi antar RT yang aman, nyaman, dan terang, sehingga mobilitas warga menjadi lebih aman dan komunitas kampung tidak lagi terfragmentasi.

2. Monitoring aktivitas ekonomi produktif

Tim akan memantau efektivitas "Pasar Lingkungan" yang diusulkan dalam menyerap hasil panen warga. Monitoring dilakukan dengan melihat apakah warga RT 02 dan RT 04 sudah mulai terorganisir dalam menjajakan hasil kebunnya (kangkung/bayam) kepada para pesepeda. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang publik yang ditata telah bertransformasi menjadi ruang produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi dapur warga, bukan sekadar menjadi elemen estetika tanpa fungsi.

3. Evaluasi partisipasi dalam pemeliharaan lingkungan

Monitoring dilakukan terhadap konsistensi warga dalam menjaga kebersihan area wisata. Mengingat adanya temuan awal mengenai kebiasaan membakar sampah di lahan kosong, evaluasi akan melihat apakah terdapat penurunan aktivitas pembakaran sampah dan peningkatan kesadaran dalam menjaga keasrian vegetasi bambu kuning. Hal ini menjadi tolok ukur penting karena lingkungan yang terawat adalah daya tarik utama agar pengunjung pesepeda terus melakukan kunjungan berulang.

Proses evaluasi ini tidak hanya bersifat teknis fisik, tetapi juga sosial-ekonomis. PkM ini dianggap berhasil apabila ruang publik yang sebelumnya dihindari telah berubah menjadi pusat aktivitas warga yang dinamis. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi catatan penting untuk penyempurnaan rencana aksi di masa mendatang, memastikan bahwa Kampung Bambu Kuning tetap tumbuh sebagai kampung kreatif yang aman, inklusif, dan berdaya secara mandiri.

BAB IV

HASIL DAN KELUARAN YANG DICAPAI

4.1 Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data

Pada tahap awal kegiatan, tim PkM melakukan pemetaan sosial dan fisik secara mendalam untuk menangkap aspirasi serta kondisi riil mitra. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui teknik wawancara *verbatim* dan observasi lapangan, ditemukan beberapa poin krusial sebagai berikut:

1. Aspirasi ekonomi dan kendala aksesibilitas

Tim berhasil memetakan bahwa warga RT 02 dan RT 04 memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan produktif, seperti menjual sayuran hasil kebun sendiri (kangkung, bayam, dan kacang panjang) serta produk makanan olahan. Namun, potensi ini terhambat oleh kondisi geografis di mana lokasi pasar terdekat (Pasar Jelupang atau Pasar Ceger) terpaut jarak yang cukup jauh dengan waktu tempuh sekitar 15 menit menggunakan sepeda motor. Ketiadaan sarana ekonomi lokal yang dekat membuat hasil panen warga seringkali tidak terserap secara optimal untuk nilai komersial.

2. Kondisi demografi dan fragmentasi wilayah

Data menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki populasi yang cukup padat dengan dominasi warga asli dan sebagian pendatang (karyawan Jasa Marga). Keberadaan jalan tol yang membelah wilayah menciptakan fragmentasi spasial. Salah satu temuan penting dari pemetaan sosial adalah adanya ketergantungan warga pada jalur-jalur kecil (jalan tikus) untuk mobilitas sehari-hari, namun jalur tersebut belum terkelola dengan baik secara standar keamanan lingkungan.

3. Identifikasi titik rawan keamanan (Jalur Katro)

Berdasarkan pemetaan psikologi lingkungan, warga secara konsisten mengidentifikasi jalur "Katro" (kolong tol) sebagai titik paling kritis. Temuan lapangan mengungkap bahwa jalur ini memiliki riwayat keamanan yang buruk, di antaranya kasus kehilangan motor dan tabung gas yang pernah memicu keresahan warga (data SIK 2025). Secara fisik, jalur ini sempit dan tidak dapat dilalui mobil, serta diperburuk dengan kondisi yang gelap total saat malam hari,

sehingga warga merasa "ngeri" dan enggan memanfaatkannya sebagai jalur penghubung.

4. Permasalahan sanitasi lingkungan

Hasil pengumpulan data juga menunjukkan adanya masalah pengelolaan limbah rumah tangga. Ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga masih melakukan praktik pembakaran sampah di lahan-lahan kosong di sekitar permukiman. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem pengangkutan sampah yang terpadu dan menyeluruh hingga ke pelosok RT, yang jika dibiarkan dapat mengurangi daya tarik estetik bagi pengunjung pesepeda.

Hasil pemetaan ini memberikan gambaran objektif bahwa Kampung Bambu Kuning memerlukan intervensi yang menyeimbangkan antara aspek keamanan sirkulasi dan penyediaan wadah ekonomi lokal. Temuan mengenai jarak pasar yang jauh dan kerawanan jalur Katro menjadi landasan utama bagi tim PkM dalam merumuskan rencana penataan koridor yang lebih fungsional dan berbasis pada keselamatan serta kesejahteraan warga.

4.2 Hasil Survei dan Analisis

Pada subbab Hasil Survei dan Analisis, penyajian laporan didasarkan pada keterkaitan/keterhubungan temuan historis dengan solusi teknis. Berdasarkan hasil survei mendalam melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga asli, tim PkM melakukan analisis terhadap akar permasalahan kerawanan di jalur "Katro". Berikut adalah hasil analisisnya:

1. Analisis Kegagalan Komunikasi Historis

Data survei (verbatim Laporan Kusmalinda) mengungkap bahwa stigma negatif jalur Katro tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisiknya, tetapi juga karena faktor historis. Pembangunan jalur tersebut di masa lalu dilakukan oleh pengurus RT sebelumnya tanpa komunikasi dan diskusi yang memadai dengan warga. Akibatnya, warga merasa tidak memiliki (*sense of belonging*) terhadap jalur tersebut. Karena "main nentuin aja" dan tidak melibatkan aspirasi warga, jalur tersebut akhirnya jarang dilalui oleh warga asli, sehingga menjadi area sepi yang memicu kerawanan.

2. Kesenjangan Keamanan dan Pencahayaan

Analisis data menunjukkan bahwa ketakutan warga mencapai puncaknya setelah pukul 17.00 WIB. Kondisi jalur yang berada di bawah struktur tol membuatnya gelap total tanpa bantuan cahaya alami, sementara fasilitas lampu penerangan jalan umum (PJU) sangat minim. Riwayat kriminalitas seperti pembegalan dan pencurian (motor serta tabung gas) semakin memperkuat persepsi bahwa jalur ini adalah "titik buta" dalam sistem keamanan kampung.

3. Solusi Penataan Ulang dan Akses Visual

Analisis PkM ini memberikan rekomendasi solusi berupa penataan ulang pencahayaan (*lighting design*) yang terintegrasi. Tujuannya adalah menghilangkan bayangan gelap yang memberikan kesan "seram". Selain pencahayaan, diusulkan adanya "pelebaran akses visual" melalui pembersihan semak belukar dan penggunaan elemen seni (seperti mural terang) pada dinding kolong tol. Konsep ini bertujuan agar area tersebut menjadi "mata" (*eyes on the street*) bagi keamanan kampung; artinya, ruang yang terang dan estetik akan mengundang orang untuk melintas, dan keramaian tersebut secara alami akan menekan angka kriminalitas.

4. Analisis Potensi Ekonomi sebagai Pengaktivasi Ruang

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa jalur ini akan tetap sepi jika hanya diterangi tanpa ada aktivitas. Oleh karena itu, tim menganalisis peluang penempatan titik-titik aktivitas ekonomi kecil di ujung-ujung koridor. Dengan adanya interaksi ekonomi antara warga yang berjualan hasil kebun dengan pengunjung, jalur Katro yang tadinya terisolasi akan kembali terhubung secara sosial dan ekonomi dengan wilayah RT lainnya.

Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan penataan jalur Katro terletak pada pemulihan fungsi sosial dan keamanannya. Dengan mengubah ruang gelap yang dihindari menjadi koridor yang terang dan terbuka secara visual, PkM ini berupaya memutus rantai ketakutan warga, sehingga jalur strategis tersebut dapat kembali berfungsi sebagai penghubung aktif yang aman bagi seluruh komunitas.

4.3 Rumusan Konsep

Berdasarkan temuan saat pendampingan PkM (FGD), rumusan konsep usulan difokuskan pada transformasi fisik penataan ruang koridor dan fungsional koridor

utama terhadap potensi pertanian lokal dan kendala keamanan di jalur Katro. Atas dasar tersebut, maka dirumuskan konsep "Koridor Kreatif Inklusif" yang bertujuan mengintegrasikan ruang publik yang aman dengan ruang ekonomi produktif. Rumusan konsep ini menitikberatkan pada pengaktifan kembali ruang yang mati menjadi ruang yang hidup. Dengan menggabungkan aspek keamanan di jalur Katro dan aspek ekonomi di titik niaga tani, koridor ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jalur penghubung fisik, melainkan menjadi urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kampung Bambu Kuning yang mandiri.

Integrasi ruang publik dengan ruang ekonomi ini akan ditempuh melalui dua intervensi utama, yaitu:

1. Revitalisasi Koridor Katro sebagai "Safe Connection", meliputi upaya:

a. Penerangan adaptif

Penerangan adaptif bukan sekadar memasang lampu jalan biasa, melainkan sebuah strategi pencahayaan ruang publik yang bertujuan menghidupkan kembali jalur yang mati secara sosial. Konsep ini bertujuan untuk menghilangkan *blind spot* (titik buta) yang selama ini menjadi lokasi rawan kriminalitas, dengan mengusulkan pemasangan lampu penerangan yang intensitasnya memadai di sepanjang kolong tol.. Berdasarkan temuan bahwa warga merasa "ngeri" karena kegelapan total dan struktur fisik kolong tol yang masif, maka pendetilan implementasinya adalah sebagai berikut:

- Teknis Implementasi:

- Penyebaran cahaya merata yang meniadakan area blind spot.

Lampu akan dipasang dengan jarak antar titik yang lebih rapat dibandingkan standar jalan umum biasa. Hal ini bertujuan agar tidak ada area bayangan (*shadow zone*) yang dapat digunakan sebagai tempat persembunyian pelaku kriminal.

- Sensor gerak adaptif

Untuk efisiensi energi namun tetap menjaga keamanan, diusulkan penggunaan lampu LED dengan sensor gerak di area tengah kolong tol. Lampu akan meredup saat sepi dan akan menyala terang secara otomatis saat mendeteksi pergerakan warga atau pesepeda, sehingga memberikan efek kejut psikologis bagi potensi gangguan keamanan.

- Pencahayaan estetik pada mural

Selain lampu utama di langit-langit/tiang, diusulkan *spotlight* yang mengarah ke dinding mural identitas kampung. Cahaya pantulan (*indirect lighting*) dari dinding ini akan membuat suasana kolong tol terasa lebih luas, hangat, dan manusiawi, bukan lagi lorong beton yang dingin dan menakutkan.

- Distribusi Peran:

- Tim PkM (Akademisi), berperan dalam menentukan spesifikasi teknis (intensitas cahaya/lumen), pemetaan titik lampu yang paling efektif berdasarkan analisis spasial, dan pembuatan desain visual sebagai panduan pemasangan.
- Warga (RT 02 & RT 04), berperan dalam proses instalasi secara gotong royong. Keterlibatan warga sangat penting untuk memulihkan "komunikasi yang hilang" pada masa pembangunan dulu. Dengan ikut memasang, warga akan memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) yang tinggi terhadap fasilitas tersebut.
- Kelompok pemuda/karang taruna berperan sebagai unit perawatan. Mereka dilatih untuk melakukan pengecekan rutin dan penggantian bohlam jika terjadi kerusakan, sehingga lampu tidak dibiarkan mati dalam waktu lama.
- Pemerintah kota/pihak Jasa Marga berperan sebagai penyedia legalitas dan dukungan daya listrik. Dokumen usulan dari PkM ini akan diajukan kepada pihak terkait sebagai dasar permohonan bantuan CSR atau integrasi dengan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) kota.

Penerangan adaptif yang melibatkan sinergi antara ahli dan warga, diharapkan dapat berfungsi sebagai 'mata keamanan' kampung pada jalur katro. Ruang yang terang secara teknis dan terjaga secara sosial akan mengeliminasi peluang kriminalitas, sekaligus mengubah citra jalur kolong tol dari area yang dihindari menjadi koridor ikonik yang membanggakan bagi warga Kampung Bambu Kuning.

b. Aktivasi visual seperti mural identitas

Aktivasi visual melalui mural dengan mengubah dinding kolong tol yang kusam menjadi galeri mural, juga menjadi strategi untuk melakukan "rebranding"

terhadap jalur Katro yang selama ini dicap negatif. Dengan mengubah dinding kusam menjadi media bercerita (*storytelling*), jalur ini akan meningkatkan rasa memiliki warga sehingga mereka lebih sering melintasi jalur ini maupun pendatang di Kampung Bambu Kuning. Implementasi akan dilakukan dengan:

- Teknis Implementasi:
 - Mural tidak dibuat secara acak, melainkan berisi narasi visual tentang sejarah Kampung Bambu Kuning, destinasi bersepeda yang menjadi ikon kampung, serta potensi pertanian warga (kangkung dan bayam). Konten ini diambil dari hasil wawancara warga agar masyarakat merasa sejarah hidup mereka dihargai.
 - Mengingat lokasi kolong tol yang gelap, pemilihan warna cat akan didominasi warna-warna cerah dan penggunaan cat reflektif pada bagian tertentu. Hal ini berfungsi ganda: memberikan nilai estetika sekaligus membantu memantulkan cahaya dari lampu "penerangan adaptif", sehingga ruangan terasa lebih luas dan tidak mencekam.
 - Beberapa bagian mural dirancang sebagai latar belakang foto yang menarik. Tujuannya adalah untuk menarik minat pengunjung pesepeda agar mau berhenti dan berfoto di jalur Katro, sehingga menciptakan keramaian alami yang secara otomatis meningkatkan keamanan kawasan.
- Distribusi Peran:
 - Tim PkM bertanggung jawab dalam merumuskan konsep visual berdasarkan data sejarah kampung dan menyiapkan sketsa kasar (*outline*) pada dinding agar komposisi mural tetap rapi dan bermakna.
 - Warga lokal dilibatkan sebagai pelaksana partisipatif. Warga, terutama yang tinggal di sekitar RT 02 dan RT 04, diajak untuk ikut serta dalam proses pengecatan (metode *community mural*). Keterlibatan ini sangat krusial untuk menjawab masalah "kurangnya komunikasi" di masa lalu. Dengan ikut memegang kuas, warga akan memiliki ikatan emosional terhadap dinding tersebut, sehingga mereka akan lebih semangat menjaga kebersihannya dari aksi vandalisme.
 - Pemuda & karang taruna yang potensial menjadi agen kreatif, bertanggung jawab menjadi penggerak utama dalam proses pengerjaan di lapangan serta

bertugas mengunggah hasil karya tersebut ke media sosial untuk mempromosikan Kampung Bambu Kuning kepada komunitas pesepeda yang lebih luas.

- Mitra swasta/CSR yang difasilitasi Tim PkM dapat memfasilitasi komunikasi dengan toko bangunan setempat atau perusahaan cat untuk mendapatkan dukungan material melalui skema kerja sama pengabdian masyarakat.

Melalui aktivasi visual ini, jalur Katro yang tadinya dianggap 'seram' dan 'kaga kepace' akan bertransformasi menjadi galeri seni publik yang membanggakan. Kehadiran mural identitas ini akan memicu rasa memiliki warga, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih sering melintasi dan menjaga jalur tersebut sebagai urat nadi konektivitas kampung yang aman dan estetik.

c. Pelebaran persepsi ruang

Pelebaran persepsi ruang adalah strategi untuk menghilangkan "blind spot" secara alami melalui penataan lanskap. Mengingat jalur Katro saat ini dianggap sempit, tertutup semak, dan "matah" (terputus pandangannya), maka diperlukan intervensi untuk memastikan *clearance* visual bagi pengguna jalan. Dengan penataan vegetasi di mulut koridor agar pandangan mata tidak terhalang (bebas semak), maka orang yang berada di ujung satu dapat melihat ujung lainnya. Hal ini secara psikologis meningkatkan rasa aman (konsep *eyes on the street*). Dengan terbukanya pandangan, warga yang berada di luar koridor atau penghuni rumah di sekitar mulut jalur dapat memantau apa yang terjadi di dalam jalur secara langsung. Keterlihatan ini secara psikologis akan menekan niat jahat dan memberikan rasa tenang bagi pejalan kaki atau pesepeda yang melintas

• Teknis Implementasi:

- Pemangkasan dan penataan vegetasi, yang dilakukan dengan pembersihan semak belukar liar yang tumbuh tidak terkendali di mulut koridor. Vegetasi yang menghalangi pandangan setinggi mata manusia (1,5 - 2 meter) akan dipangkas, sehingga menciptakan jarak pandang bebas dari ujung satu ke ujung lainnya (*linear visibility*).
- Aplikasi tanaman rendah dan teratur dengan mengganti tanaman liar menjadi tanaman hias yang rendah (tidak lebih dari 60 cm) atau pohon

dengan batang yang bersih (tanpa dahan rendah). Hal ini memastikan bahwa area tersebut tetap asri namun tidak ada tempat tersembunyi bagi potensi pelaku kejahatan.

- Distribusi Peran:

- Tim PkM bertanggung jawab sebagai Perencana Lanskap yang berperan dalam mengidentifikasi jenis vegetasi yang sesuai dengan karakter "Bambu Kuning" namun tetap memenuhi standar keamanan. Tim juga menentukan garis pandang (*sightlines*) yang harus dijaga agar tidak terhalang.
- Warga RT 02 & RT 04 melalui aksi gotong royong, menjadi motor penggerak dalam kegiatan "Kerja Bakti Masal" untuk membersihkan semak liar. Keterlibatan warga sangat penting agar mereka tahu mana area yang harus dibersihkan secara rutin untuk menjaga keamanan wilayahnya sendiri.
- Pemuda & karang taruna menjadi Tim Pemeliharaan yang bertanggung jawab dalam jadwal pemeliharaan tanaman secara berkala agar tidak kembali rimbun dan menutupi pandangan. Mereka juga berperan sebagai pengawas lingkungan yang melaporkan jika ada kerusakan fisik pada batas-batas koridor.
- Pemerintah Kelurahan memberikan dukungan sarana, termasuk dalam memfasilitasi penyediaan alat potong atau pengangkutan limbah dahan/semak hasil pembersihan melalui koordinasi dengan dinas terkait di Kota Tangerang Selatan.

Melalui pelebaran persepsi ruang ini, kendala fisik jalur Katro yang sempit dan 'menyeramkan' dapat diatasi tanpa harus melakukan pembongkaran struktur besar. Ruang yang terbuka secara visual akan menciptakan kontrol sosial yang alami, di mana keterbukaan pandangan menjadi jaminan keamanan bagi setiap warga yang melintas, sekaligus memperkuat konektivitas antar-wilayah yang selama ini terfragmentasi.

2. Pengembangan Pasar Lingkungan "Gowes-Tani", dengan menyediakan:

a. Titik niaga strategis

Selain menentukan tempat berjualan, penetapan titik niaga strategis juga menjadi upaya rekayasa ruang untuk menciptakan titik temu (*meeting point*) antara

produsen (warga tani) dan konsumen (pesepeda). Berdasarkan temuan bahwa akses ke pasar besar mencapai 15 menit, titik ini akan menjadi "mini market" komunitas yang vital. Penetapan titik zona perdagangan kecil mempertimbangkan area yang bersinggungan langsung dengan jalur utama pesepeda. Lokasi ini dipilih agar tidak mengganggu akses mobil warga namun tetap terlihat jelas oleh pengunjung.

- Teknis Implementasi:

- Pemetaan sirkulasi dan node, dengan menentukan lokasi pada persimpangan atau area terbuka di RT 02 dan RT 04 yang merupakan jalur utama pesepeda. Titik ini harus memiliki jarak pandang (*visibility*) yang luas sehingga pesepeda dapat melihat produk dari jarak jauh dan memiliki ruang cukup untuk melambatkan laju sepeda.
- Pengaturan batas spasial menggunakan marka jalan sederhana atau perbedaan material lantai (seperti *paving* atau cat warna) untuk memisahkan area dagang dengan jalur kendaraan bermotor (mobil warga). Hal ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menciptakan kemacetan di pemukiman yang padat.
- Penyediaan area parkir sepeda sederhana di titik strategis. Tujuannya agar pesepeda merasa aman meninggalkan sepedanya sejenak untuk melihat-lihat hasil panen kangkung atau bayam, yang pada akhirnya meningkatkan durasi kunjungan dan potensi transaksi.

- Distribusi Peran:

- Tim PkM melakukan survei arus lalu lintas warga dan pengunjung untuk menentukan titik yang paling menguntungkan secara ekonomi namun paling minim risiko konfliknya dengan sirkulasi mobil warga.
- Pengurus RT 02 & RT 04 berperan sebagai penentu kebijakan zonasi. Mereka yang memberikan izin penempatan lapak dan memastikan bahwa lokasi yang dipilih tidak melanggar kesepakatan penggunaan lahan antar-warga.
- Warga pedagang (kelompok UMKM) berperan dalam memberikan masukan mengenai jam operasional puncak dan jenis produk yang paling

laku, sehingga penempatan titik niaga benar-benar sesuai dengan ritme pasar di lapangan.

- Pemuda karang taruna berperan sebagai manajemen parkir & kebersihan yang memastikan area niaga tetap tertib, membantu pengaturan parkir sepeda pengunjung di akhir pekan, serta menjaga agar titik strategis tersebut tetap bersih dari sampah sisa dagangan.

Penetapan titik niaga yang strategis akan menjadi solusi bagi hambatan jarak pasar yang selama ini dialami warga. Dengan menempatkan zona perdagangan tepat di jantung aktivitas wisata gowes, warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk menjual hasil buminya. Sebaliknya, ekonomi yang mendatangi warga, mengubah jalur sirkulasi yang pasif menjadi urat nadi perdagangan yang produktif dan tertata.

b. Lapak produk lokal

Penyediaan desain lapak sederhana namun seragam yang difungsikan khusus bagi warga RT 02 dan RT 04 untuk menjual hasil panen kebun (kangkung, bayam) dan makanan olahan. Dengan adanya lapak ini, kebutuhan warga akan pasar yang dekat (mengatasi masalah jarak 15 menit ke pasar besar) dapat terpenuhi sekaligus menangkap peluang ekonomi dari pesepeda. Desain yang murah dan fungsional, lapak ini akan menjadi identitas visual baru bagi produk pertanian RT 02 dan RT 04 akan dipenuhi dengan:

- Teknis Implementasi:
 - Desain menggunakan material yang mudah didapat dan murah seperti kayu palet atau bambu (sesuai identitas kampung). Desain dibuat *knock-down* (bongkar pasang) agar warga dapat menyimpannya saat tidak digunakan, sehingga tidak mengokupasi ruang publik secara permanen.
 - Setiap lapak akan memiliki elemen visual yang seragam, misalnya penggunaan peneduh (atap) berwarna senada atau papan nama kayu bertuliskan "Hasil Kebun RT 02/04". Hal ini menciptakan kesan rapi dan tepercaya di mata pesepeda.
 - Desain lapak akan menyertakan rak miring untuk memajang sayuran segar (kangkung, bayam) agar air sisa pencucian dapat mengalir dan sayuran tetap

terlihat segar dari kejauhan. Tersedia juga area kecil untuk makanan olahan yang higienis.

- Distribusi Peran:

- Tim PkM dengan kompetensi Arsitek/Desainer membuat gambar kerja desain lapak yang ergonomis, hemat material, dan mudah dirakit oleh orang awam. Tim juga memberikan asistensi dalam pemilihan cat atau pelapis material agar tahan cuaca.
- Kelompok UMKM & petani lokal yang merupakan pengguna utama lapak, memberikan masukan terkait ukuran meja yang dibutuhkan sesuai dengan volume panen harian mereka. Warga juga bertanggung jawab menjaga kebersihan lapak masing-masing.
- Pemuda karang taruna yang menjadi Tim Produksim bertindak sebagai "tukang" yang merakit lapak-lapak tersebut secara masal setelah mendapatkan pelatihan dari tim PkM. Hal ini sekaligus menjadi ajang transfer keterampilan pertukangan bagi pemuda desa.
- Sponsor/Donatur pendanaan difasilitasi Tim PkM bersama pengurus lingkungan menyediakan bantuan pendanaan untuk material melalui skema hibah internal kampus atau bantuan perusahaan sekitar, sehingga warga hanya perlu kontribusi dalam tenaga kerja.

Keberadaan lapak yang seragam dan estetis ini akan mengubah cara pandang wisatawan terhadap produk warga; dari sekadar jualan pinggir jalan menjadi produk lokal yang eksklusif dan bernilai jual tinggi. Lapak ini bukan hanya meja kayu biasa, melainkan simbol kemandirian ekonomi warga Kampung Bambu Kuning yang mampu menjawab tantangan jarak pasar dengan membawa pasar ke depan pintu rumah mereka sendiri.

c. Ruang interaksi inklusif

Ruang interaksi inklusif dirancang untuk memecah sekat sosial yang selama ini tercipta akibat fragmentasi wilayah (adanya tol) dan perbedaan latar belakang warga (asli vs pendatang). Dengan menyediakan ruang singgah di area pasar, tercipta kesempatan bagi berbagai elemen masyarakat untuk bertemu secara organik dalam suasana yang santai.

- Teknis Implementasi:

- Penyediaan elemen *street furniture*, dengan menempatkan bangku-bangku singgah (papan kayu atau semen cor) dengan penataan yang berkelompok di sekitar titik niaga. Bangku-bangku ini didesain menghadap ke area aktivitas agar orang yang duduk merasa menjadi bagian dari keramaian kampung.
- Peneduh alami (vegetasi) yang dirancang memanfaatkan kerindangan pohon bambu kuning atau tanaman peneduh lainnya di sekitar bangku. Hal ini penting agar area tersebut tetap sejuk, sehingga pesepeda yang lelah atau warga yang sedang berbelanja merasa betah untuk beristirahat dan memulai percakapan.
- Penyediaan papan informasi komunitas yang berfungsi sebagai papan buletin sederhana di area tersebut yang berisi informasi kegiatan kampung, jadwal panen kangkung, hingga sejarah singkat kampung. Papan ini menjadi pemantik obrolan antara wisatawan yang penasaran dengan warga lokal.
- Distribusi Peran:
 - Tim PkM (Perencana Ruang), mendesain tata letak bangku agar mendorong interaksi (misalnya posisi bangku yang saling berhadapan) dan memastikan desainnya aksesibel bagi semua kalangan, termasuk lansia.
 - Tokoh masyarakat & sesepuh kampung berperan sebagai "tuan rumah" yang aktif berada di ruang tersebut. Kehadiran tokoh masyarakat di ruang publik ini sangat krusial untuk memberikan rasa aman dan menyapa pengunjung, sehingga kesan "tertutup" yang dulu sempat ada bisa hilang.
 - Karyawan Jasa Marga & warga pendatang didorong untuk ikut memanfaatkan ruang ini di waktu luang, sehingga terjadi asimilasi budaya dan komunikasi yang lebih cair dengan warga asli di RT 02 dan RT 04.
 - Wisatawan pesepeda berperan sebagai penggerak interaksi eksternal. Dengan tersedianya tempat duduk yang nyaman, pesepeda tidak hanya lewat, tetapi bisa berinteraksi dengan petani, yang pada akhirnya memperluas jaringan pemasaran produk warga secara informal.

Ruang interaksi inklusif ini adalah upaya bagi masalah isolasi sosial yang sempat dialami warga Kampung Bambu Kuning. Dengan menyediakan tempat untuk

sekadar duduk dan bercerita, PkM ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kembali jembatan komunikasi antarwarga. Di ruang inilah, identitas kampung kreatif benar-benar terbentuk melalui dialog, tawa, dan transaksi yang humanis antara warga, pendatang, dan wisatawan.

Seluruh pendetilan konsep di atas merupakan manifestasi dari hasil pendampingan PkM melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama warga. Rumusan konsep ini difokuskan pada transformasi fisik dan fungsional koridor utama untuk menjawab kontradiksi antara potensi pertanian lokal yang melimpah dengan kendala keamanan di jalur Katro. Melalui visi '**Koridor Kreatif Inklusif**', tim PkM berupaya mengintegrasikan ruang publik yang aman dengan ruang ekonomi produktif secara kohesif. Dengan menitikberatkan pada pengaktifan kembali ruang yang sebelumnya 'mati' menjadi ruang yang hidup, koridor ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai jalur penghubung fisik antar RT, melainkan bertransformasi menjadi urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Kampung Bambu Kuning yang mandiri, aman, dan berdaya saing.

4.4 Indikator Capaian Penataan

Indikator capaian berfungsi sebagai jembatan yang mengubah visi abstrak 'Kampung Kreatif' menjadi realitas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Dengan indikator yang jelas, setiap langkah penataan di Kampung Bambu Kuning memiliki tujuan yang terukur, sehingga dampak positif dari program PkM ini tidak hanya menjadi catatan di atas kertas, tetapi menjadi sejarah baru bagi kemandirian dan keamanan lingkungan setempat. Untuk mengukur efektivitas dari konsep "Koridor Kreatif Inklusif" yang telah dirumuskan, ditetapkan beberapa indikator capaian yang mencakup aspek keruangan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

1. Indikator Keamanan dan Aksesibilitas (Fisik):

- Tereliminasi *blind spot*, dengan terpasangnya sistem penerangan adaptif di sepanjang kolong tol Jalur Katro dengan cakupan cahaya 100% pada area-area kritis yang sebelumnya gelap total.
- Peningkatan jarak pandang, melalui upaya *visual clearance* di mulut koridor, dimana warga dapat melihat ujung jalur secara jelas tanpa terhalang semak liar,

yang dibuktikan dengan meningkatnya rasa aman warga saat melintas di malam hari.

- Aktivasi jalur melalui peningkatan frekuensi penggunaan jalur Katro oleh kelompok rentan (ibu-ibu dan anak-anak) sebagai jalur sirkulasi harian, yang menandakan hilangnya stigma "seram" pada area tersebut.

2. Indikator Produktivitas Ekonomi (Fungsional):

- Ketersediaan wadah niaga dengan terbangunnya lapak-lapak produk lokal yang seragam dan fungsional di titik-titik niaga strategis, yang siap menampung hasil panen warga RT 02 dan RT 04.
- Peningkatan penyerapan produk lokal yang terjadi melalui transaksi rutin antara warga dengan pengunjung (pesepeda) di lokasi pasar lingkungan, sehingga warga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasar besar yang jaraknya jauh (15 menit dengan motor).
- Daya tarik wisata melalui peningkatan kunjungan wisatawan pesepeda yang berhenti untuk berinteraksi atau berfoto di area mural, yang secara langsung berdampak pada volume penjualan produk olahan warga.

3. Indikator Keberlanjutan Sosial (Manajerial):

- Sinergi antar warga melalui terjalinnya komunikasi yang lebih intens antara warga asli dan pendatang melalui pemanfaatan ruang interaksi inklusif, yang mengurangi fragmentasi sosial akibat batas wilayah.
- Kemandirian pengelolaan yang diwujudkan melalui kesepakatan kolektif antar-pengurus RT dalam menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas yang telah ditata, serta kesediaan warga untuk merawat mural dan vegetasi secara swadaya.

Pencapaian seluruh indikator di atas akan menjadi bukti nyata transformasi Kampung Bambu Kuning dari kawasan yang terfragmentasi menjadi kampung kreatif yang terintegrasi. Dengan terpenuhinya target fisik maupun sosial ini, keberhasilan PkM tidak hanya diukur dari perubahan wajah kampung secara estetika, tetapi juga dari kembalinya kedaulatan warga atas ruang publik mereka sendiri dan terciptanya ekosistem ekonomi mikro yang tangguh dan berkelanjutan.

4.5 Rencana Keberlanjutan Program Penataan

Program PkM dirancang tidak hanya sebagai kegiatan insidental, namun sebagai pemantik bagi pembangunan jangka panjang di Kampung Bambu Kuning. Rencana keberlanjutan pasca penataan difokuskan pada langkah-langkah strategis berikut:

1. Formalisasi Dokumen Usulan (Proposal Penataan)

Seluruh hasil pemetaan, analisis spasial, dan rumusan konsep "Koridor Kreatif Inklusif" yang telah disusun bersama masyarakat akan dibukukan menjadi sebuah dokumen usulan teknis yang komprehensif. Dokumen ini bukan sekadar laporan akademik, melainkan berfungsi sebagai *Blueprint* Penataan Kampung yang memiliki legitimasi karena disusun berdasarkan aspirasi langsung warga (hasil FGD dan *Live-in*).

2. Advokasi ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Langkah konkret berikutnya adalah melakukan pengajuan bantuan sarana dan prasarana kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui dinas terkait (seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan atau Dinas Pariwisata). Dokumen usulan ini akan dijadikan bahan advokasi utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan hingga kecamatan. Dengan adanya dokumen teknis yang matang dari PkM ini, posisi tawar warga menjadi lebih kuat untuk mendapatkan alokasi APBD dalam merealisasikan infrastruktur permanen seperti lampu PJU dan pengerasan jalur.

3. Pendampingan Pengelolaan Dana Swadaya

Sambil menunggu respon dari kebijakan pemerintah, tim PkM akan tetap memberikan asistensi dalam pengelolaan dana bagi hasil dari unit ekonomi "Pasar Lingkungan". Dana yang terkumpul dari hasil niaga kangkung dan bayam kepada pesepeda akan diarahkan untuk membiayai perawatan ringan secara mandiri, seperti pembersihan mural dan penggantian bohlam lampu secara berkala, guna menjamin fasilitas tetap berfungsi optimal.

Melalui rencana keberlanjutan ini, program PkM berperan sebagai jembatan birokrasi bagi masyarakat Kampung Bambu Kuning. Dengan mentransformasikan aspirasi warga ke dalam format dokumen usulan yang profesional, peluang untuk mendapatkan dukungan sarana prasarana dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadi lebih terbuka lebar. Hal ini memastikan bahwa visi menjadikan koridor utama

sebagai ruang yang aman dan produktif dapat terwujud secara permanen dan berkesinambungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBERLANJUTAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan PkM melalui metode *Live-in* dan analisis mendalam terhadap kondisi Kampung Bambu Kuning, dapat disimpulkan beberapa poin utama:

1. Transformasi ruang dan keamanan, dimana Jalur "Katro" yang sebelumnya dianggap "seram" dan menjadi sumber kerawanan kriminalitas akibat minimnya komunikasi pembangunan dan buruknya pencahayaan, kini memiliki rumusan solusi teknis melalui konsep "Koridor Kreatif Inklusif". Intervensi penerangan adaptif, mural identitas, dan pelebaran persepsi ruang secara efektif mampu mengubah titik buta kampung menjadi jalur mobilitas yang aktif dan aman.
2. Pemberdayaan ekonomi lokal yang meniadakan hambatan jarak ke pasar besar (15 menit) berhasil dirumuskan dengan konsep "Pasar Lingkungan Gowes-Tani". Dengan memanfaatkan jalur utama pesepeda sebagai titik niaga strategis, warga RT 02 dan RT 04 kini memiliki wadah produktif untuk memasarkan hasil bumi (kangkung dan bayam) secara langsung kepada pengunjung.
3. Integrasi sosial melalui kegiatan PkM ini berhasil memicu kembali komunikasi sosial antarwarga yang sempat terfragmentasi. Melalui penyediaan ruang interaksi inklusif, hubungan antara warga asli dan pendatang dapat dipererat kembali melalui aktivitas ekonomi dan sosial di ruang publik yang baru ditata.

5.2 Rekomendasi Keberlanjutan Program

Dampak positif dari kegiatan PkM diharapkan tidak bersifat sesaat dan dapat berjalan secara otonom. Untuk itu maka disusun rekomendasi strategis yang bertumpu pada kemandirian lokal dan penguatan posisi tawar masyarakat. Strategi utama keberlanjutan program meliputi:

1. Pembentukan Kelompok Pengelola Fasilitas Umum
Disarankan agar pengurus RT 02 dan RT 04 membentuk kelompok kecil yang terdiri dari perwakilan warga dan unsur pemuda. Kelompok ini memiliki tugas khusus untuk memastikan operasional dan pemeliharaan rutin fasilitas, terutama

sistem pencahayaan di jalur "Katro" dan kebersihan area mural agar tidak kembali kusam. Langkah ini belajar dari pengalaman masa lalu (data SIK 2025), di mana kurangnya komunikasi dan rasa memiliki menyebabkan infrastruktur menjadi tidak terawat dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

2. Formalisasi Usulan ke Pemerintah Kota

Dokumen usulan penataan yang telah disusun bersama tim PkM harus segera diajukan sebagai usulan prioritas dalam Musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan. Hal ini sangat krusial untuk mendapatkan dukungan bantuan sarana prasarana permanen dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, seperti pengadaan PJU resmi, perbaikan pengerasan jalan, dan fasilitas persampahan terpadu.

3. Mekanisme Pembiayaan Swadaya dan Bagi Hasil Ekonomi

Untuk membiayai operasional listrik dan perawatan lingkungan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan luar, diterapkan dua skema pendanaan:

- Iuran swadaya yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga untuk menyisihkan sebagian dana keamanan dan kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama.
- Bagi hasil ekonomi kreatif, dengan mengalokasikan sebagian keuntungan dari "Pasar Lingkungan" atau lapak hasil kebun (kangkung/bayam) sebagai kas pemeliharaan. Semakin banyak wisatawan pesepeda yang berbelanja, semakin terjamin pula biaya perawatan fasilitas kampung.

4. Manajemen Kebersihan dan Estetika Lingkungan

Sebagai upaya mengubah kebiasaan lama pembakaran sampah di lahan kosong (data verbatim Kusmalinda), KPFU direkomendasikan untuk menginisiasi jadwal pengangkutan sampah yang teratur serta menjaga kelestarian vegetasi bambu kuning. Lingkungan yang bersih dan asri secara konsisten akan menjadi jaminan bahwa Kampung Bambu Kuning tetap menjadi destinasi pilihan bagi komunitas pesepeda.

5. Promosi Komunitas Berbasis Digital

Mendorong peran aktif Karang Taruna untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi "Mural Identitas" dan titik niaga warga. Publikasi yang kreatif akan menjaga kontinuitas kunjungan wisatawan, yang secara langsung menjadi bahan bakar bagi perputaran ekonomi mandiri warga.

Sebagai penutup, keberhasilan penataan Kampung Bambu Kuning terletak pada sinergi antara perencanaan teknis yang solutif dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui integrasi antara tanggung jawab sosial (iuran swadaya) dan keuntungan ekonomi (bagi hasil pasar), program ini diharapkan dapat tumbuh secara mandiri. Kesimpulan dan rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi warga dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan kampung kreatif yang tidak hanya asri, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman, mandiri secara ekonomi, dan memiliki kohesi sosial yang kuat bagi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jacobs, J. (1961). *The Death and Life of Great American Cities*. Random House.
- Jeffery, C. R. (1971). *Crime Prevention Through Environmental Design*. Sage Publications.
- Madjid, K. (2025). *Laporan Penelitian: Kajian Pemetaan Sosial untuk Pengembangan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Tangerang Selatan. Studi Kasus: Kampung Bambu Kuning, Kecamatan Pondok Aren*. Tangerang Selatan: Institut Teknologi Indonesia.
- Murphy, P. E. (1985). *Tourism: A Community Approach*. Routledge.
- Murphy, P. E., & Murphy, A. E. (2004). *Strategic Management for Tourism Communities: Bridging the Gap*. Channel View Publications.
- Newman, O. (1972). *Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design*. Macmillan.
- Project for Public Spaces. (2000). *How to Turn a Place Around: A Handbook for Creating Successful Public Spaces*. PPS, Inc.
- [SIK]. 2025. *Laporan Studio Integral Komunitas: Analisis Kebutuhan Warga Kampung Gowes Bambu Kuning Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan*. Tangerang Selatan: Institut Teknologi Indonesia.
- Whyte, W. H. (1980). *The Social Life of Small Urban Spaces*. Conservation Foundation.

